



LAPORAN AKHIR:
Analisis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA /SMK Provinsi Banten
TAHUN 2019

Policy Brief
BIAYA OPERASI PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI BANTEN

Anggaran pendidikan Provinsi Banten terdiri dari belanja tidak langsung dengan alokasi yang cukup besar (49,41%), selebihnya adalah belanja langsung (51,6%). Secara ideal menghitung *unit cost* BOP Pendidikan menengah harus meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Namun, belanja tidak langsung umumnya dikategorikan sebagai biaya tetap (*fixed cost*) dan tidak termasuk ke dalam kategori biaya operasional pendidikan. Oleh karena itu kajian ini memperkirakan *unit cost* dari belanja langsung yang dipartisikan dalam tiga kelompok belanja: BOP Non-BOS yang dibelanjakan oleh Dinas Pendidikan, BOS, dan Belanja Personil di sekolah yaitu honorarium guru tidak tetap (GTT).

Seiring dengan belanja BOS oleh Pemerintah yang disalurkan melalui dana perimbangan (DAK Non-Fisik), pemerintah provinsi Banten menambah anggaran belanja BOS Daerah (BOSDA) sesuai kebutuhan daerah dan kemampuan fiskalnya. Berdasarkan komitmen untuk mewujudkan pendidikan menengah gratis dan dengan kemampuan fiskalnya, pemerintah provinsi Banten menambah belanja BOSDA di luar alokasi DAK non-fisik. Belanja BOSDA provinsi Banten adalah sebesar Rp. 366,8 milyar (58,5%) lebih besar dari BOS DAK non-fisik, sebesar Rp. 260,5 milyar (41,5%), sehingga BOS seluruhnya menjadi belanja terbesar, yaitu Rp. 627,4 milyar, atau 35,6% seluruh belanja pendidikan di provinsi Banten tahun 2018.

Belanja langsung pendidikan yang kedua terbesar adalah BOP Non-BOS, sebesar Rp. 323,2 milyar (38,2%). Melalui belanja ini Disdik memfasilitasi sekolah-sekolah untuk menopang kebijakan Gubernur, mewujudkan pendidikan gratis yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan wilayah. Jenis-jenis belanja dalam BOP Dikmen Non-BOS diharapkan mampu mendorong proses pendidikan dan pembelajaran secara terarah dengan membelanjakan BOS secara efektif di sekolah. Terdapat paling tidak 10 jenis kegiatan dalam kelompok BOP Non-BOS dengan jumlah belanja yang bervariasi, yaitu: manajemen dan koordinasi; peningkatan TU KCD Dikbud; Pengembangan SDM pendidikan, Layanan, Pemanfaatan dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Peningkatan Kurikulum; Pengembangan Sekolah Model CMBBS (khusus SMA); Peningkatan Sarpras Pendidikan; Peningkatan Peserta Didik, Pemeliharaan dan Perbaikan Sarpras (DAK); serta Peningkatan Guru dan Tendik (GTK).

Di samping itu terdapat pula belanja personil yaitu honorarium GTT baik yang mengajar di sekolah menengah negeri maupun swasta yang cukup besar karena banyaknya jumlah GTT sebagai akibat dari moratorium pengangkatan guru PNS selama 10 tahun. Oleh karena dibelanjakan di sekolah, honorarium GTT adalah belanja operasional sebagai bagian dari BOSDA. Pada tahun 2019, belanja honorarium GTT adalah sebesar Rp. 40,9 milyar untuk SMA dan 47,3 milyar untuk SMK yang meskipun merupakan belanja operasional, namun jika dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan sebagai *fixed cost* di tingkat satuan pendidikan.



LAPORAN AKHIR:
Analisis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA /SMK Provinsi Banten
TAHUN 2019

1. BELANJA BOP NON-BOS

Belanja peningkatan sarana dan prasarana pendidikan adalah BOS Non-BOS yang pada tahun 2018 merupakan belanja terbesar (24,7%) dari BOP belanja langsung pendidikan. Dengan komitmen untuk menyediakan pendidikan gratis yang bermutu, pada tahun 2018 Pemprov menambah belanja peningkatan sarana/prasarana pendidikan sebesar Rp. 184 milyar atau jauh lebih besar dari DAK-Fisik sebesar 66,2 milyar, sehingga jumlah belanja Sarpras seluruhnya adalah Rp. 250,3 milyar, atau 26,5% dari seluruh belanja langsung pendidikan di provinsi ini.

Proporsi belanja BOP Non-BOS di luar belanja peningkatan sarpras pendidikan masih sangat kecil. Sesuai dengan nomenklatur yang ada, proporsi belanja BOP Non-BOS di luar peningkatan sarpras pendidikan adalah sebagai berikut: peningkatan kurikulum sekolah (1,06%); pelayanan dan pemanfaatan TIK (0,31%); pengembangan Model SMA CMBBS (1,06%); dan pengembangan peserta didik (1,99%). Kecilnya belanja tersebut menunjukkan bahwa belanja yang terkait langsung dengan konten dan proses pendidikan di sekolah masih sangat kecil, sehingga proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah ditengarai belum banyak terdampak oleh pola belanja tersebut.

Belanja Manajemen dan Koordinasi sebesar (Rp. 27.4 milyar), merupakan belanja terbesar yang ketiga dari belanja BOP Non-BOS namun realisasinya rendah, yaitu 38,2% pada tahun 2018. Efektivitas jenis belanja ini sulit dicapai jika hanya melalui rapat-rapat kerja para pengelola pendidikan di tingkat provinsi karena sering tidak berkaitan langsung dengan kepentingan sekolah. Jenis belanja ini sering disebut kegiatan manajemen di atas manajemen (*meta management*), seperti: Penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca aset, Perencanaan evaluasi dan pelaporan, Pengadaan sarana prasarana kantor, Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Penyediaan barang dan jasa perkantoran, Peningkatan kapasitas aparatur, Rapat koordinasi dalam dan keluar daerah, pengelolaan kearsipan dan Pelayanan perpustakaan, serta Penyediaan data pembinaan sektoral.

2. UNIT COST BOP DIKMEN

Berdasarkan besaran belanja langsung (BOP Non-BOS, BOS (DAK), dan BOSDA yang di dalamnya termasuk belanja pegawai di tingkat sekolah), rata-rata *Unit Cost* (UC) sekolah menengah (SMA & SMK) adalah 5,43 juta per-siswa/tahun. Besaran UC ini adalah minimal karena tidak termasuk belanja tidak langsung, seperti Gaji Guru ASN, Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan lain baik dari dana perimbangan maupun APBD. Belanja tidak langsung ini bersifat rutin (*recurrent budget*) dan merupakan biaya tetap (*fixed cost*). Jika belanja tidak langsung ini diperhitungkan, maka *Unit Cost* anggaran pendidikan menengah provinsi Banten sudah berada di atas Rp. 6,3 juta per-siswa/tahun.

Berdasarkan realisasi belanja yang diperoleh melalui kajian BOP Dikmen, rata-rata *Unit Cost* (UC) BOS SMA adalah Rp. 5,33 juta yang bergerak dari Rp 4,92 juta (terendah), dan Rp. 5,71 (tertinggi). Rata-rata *Unit Cost* BOP SMK lebih besar yaitu Rp. 5,64 juta yang bergerak dari Rp. 4,97 juta (terendah) hingga



LAPORAN AKHIR:
Analisis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA /SMK Provinsi Banten
TAHUN 2019

Rp. 5,84 juta (tertinggi). SMK adalah satuan pendidikan yang dirancang relatif lebih mahal, terutama biaya yang dibebankan pada pemerintah. Sebagian SMK telah dilengkapi dengan sarpras seperti bengkel kerja, *workshop*, unit produksi, serta semakin intensifnya praktek kerja industri yang sangat penting untuk pendidikan vokasi sekarang ini.

Besaran UC SMA dan SMK juga sangat bervariasi menurut kabupaten/kota. Unit Cost BOP SM yang tertinggi adalah di wilayah Tangerang Raya sebagai wilayah berkembang dalam ekonomi industri dan ekonomi perkotaan, serta merupakan daerah penyangga ibukota. Di wilayah ini juga bermunculan sekolah-sekolah unggul, di antaranya bertaraf internasional. Rata-rata UC sekolah menengah yang paling rendah adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebagai wilayah yang dominan pedesaan. UC sekolah menengah di Kota Serang dan Kota Cilegon adalah sedang-sedang saja dan mirip dengan rata-rata UC pada tingkat provinsi Banten.

3. PERKIRAAN UNIT COST DAN KENAIKAN BOP DIKMEN TAHUN 2020

Minimnya belanja pelatihan guru dan tendik sebesar (1,9%) tidak sederhana dampaknya, karena guru akan selalu ketinggalan dalam inovasi kurikulum dan pembelajaran, termasuk pembelajaran digital (*cyber learning*) yang justru lebih dikuasai oleh siswa ketimbang oleh gurunya. Pengadaan sarpras yang berbasis digital, akan sulit dimanfaatkan oleh guru jika tidak diimbangi dengan pelatihan guru dan tendik untuk mengoperasikannya terutama yang bermuatan teknologi digital. Bagi tenaga pengelola, pelatihan juga diperlukan, bukan hanya untuk mengoperasikan teknologi, tetapi juga agar mereka dapat mengikuti perkembangan zaman dalam memilih dan menentukan belanja teknologi mutakhir yang beragam.

Kebutuhan untuk menaikkan anggaran BOP Dikmen pada tahun 2020 adalah cukup besar namun penting, atau naik hingga 22% dari anggaran 2019. Besaran anggaran BOP Dikmen tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 1.369,6 milyar atau 224,6 milyar lebih besar dari pagu anggaran 2019. Peningkatan anggaran ini penting bukan hanya untuk menunjang kebijakan Gubernur mewujudkan sekolah gratis yang bermutu dan berdaya saing, tetapi juga untuk secara bertahap mewujudkan 20% anggaran pendidikan dari APBD. Sebelum adanya kebijakan tersebut, kenaikan anggaran tidak lebih dari 10% sejak tahun 2016; komitmen Gubernur yang sangat penting ini perlu didukung oleh anggaran belanja yang memadai.

Peningkatan anggaran yang sangat signifikan yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020 adalah belanja BOSDA. Pada tahun 2020, belanja BOSDA bukan hanya jauh lebih besar dari tahun 2019, tetapi alokasi BOSDA juga semakin tersebar dan berimbang. Belanja BOSDA pada tahun 2020 diperkirakan Rp. 903,2 milyar atau tiga kali lebih besar dari BOS (DAK) sebesar Rp. 299,9 milyar, dan 14% lebih besar dari BOSDA tahun 2019 (Rp. 788,4 milyar). Kenaikan belanja BOSDA ini menunjukkan komitmen Pemprov yang sangat



LAPORAN AKHIR:
Analisis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA /SMK Provinsi Banten
TAHUN 2019

besar baik untuk mutu dan keunggulan, tetapi juga pendidikan yang bebas biaya (*universal and free secondary education*), mengikuti gerakan dunia yang dirintis oleh Bank Dunia sejak tahun 2005.

Belanja BOSDA tahun 2020 juga semakin tersebar dan berimbang antara jenis belanja pengadaan dan peningkatan sarpras fisik (*hardware*) dengan pembinaan konten kurikulum dan pembelajaran serta pelatihan/pengembangan SDM guru dan tenaga kependidikan (*software*). Pada tahun 2019, peningkatan *hardware* merupakan belanja yang paling dominan dan mencapai 60-70% dari belanja BOSDA, dan sisanya untuk *software*. Pada tahun 2020, diperkirakan akan terjadi perubahan struktur BOSDA secara mendasar yang antara lain dengan adanya perimbangan belanja antara belanja *hardware* pendidikan, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pelatihan SDM guru dan tenaga kependidikan, serta honorarium GTT. Kenaikan dalam keempat kelompok belanja tersebut adalah peralihan dari sebagian belanja BOSDA yang dibelanjakan di sekolah.

Akhirnya, tingkat kenaikan BOSDA yang dibelanjakan di sekolah akan semakin kecil, namun penggunaannya harus benar-benar efisien dan efektif. Oleh karena itu alokasi BOSDA ke sekolah harus diarahkan pada kegiatan yang paling peka untuk mendorong siswa belajar secara optimal. Diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang paling baik untuk didanai oleh BOSDA di antaranya adalah: pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di sekolah, daya dan jasa dan bahan habis pakai untuk keperluan laboratorium, praktek kerja dan kunjungan industri (terutama SMK), transportasi dan konsumsi untuk kegiatan praktek industri, kegiatan ekstra kurikuler (SMA), dan uji kompetensi di SMA dan SMK. Namun, uji kompetensi yang dilakukan oleh sekolah ditengarai kurang efektif dan dalam waktu dekat Pemerintah memberlakukan uji kompetensi melalui kerjasama dengan LSP yang relevan.

A. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan kesimpulan kajian ini dikemukakan beberapa implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten, sebagai berikut.

1. Kebijakan Pemprov untuk mewujudkan pendidikan menengah gratis yang bermutu dan berdaya saing merupakan langkah taktis dari Gubernur Banten dalam rangka menaikkan anggaran pendidikan dari 17,7% (2018) secara bertahap menjadi minimal 20% dari APBD mulai tahun 2020, sesuai amanat UUD 1945 dan UUSPN No. 20/2003
2. Selain menaikkan anggaran, prioritas perlu diarahkan pada realokasi anggaran dengan menyeimbangkan belanja manajemen dan koordinasi dan pengadaan sarpras fisik dengan belanja pengembangan konten, proses, dan pengembangan SDM yang hingga tahun 2019. Kegiatan-kegiatan yang masih kecil anggarannya, yaitu: pelatihan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan, praktek kerja industri di SMK, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, serta pengadaan dan pengembangan program teknologi informasi dan komunikasi digital untuk pembelajaran.



LAPORAN AKHIR:
Analisis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA /SMK Provinsi Banten
TAHUN 2019

3. Kenaikan belanja BOP Non-BOS (belanja langsung) ditengarai akan cukup signifikan pada beberapa komponen kegiatan sebagai manifestasi dari upaya menopang pewujudan pendidikan menengah gratis dan unggul mulai tahun 2020 dan seterusnya. Oleh karena itu, penajaman beberapa komponen belanja penting dilakukan mulai tahun 2020. Komponen-komponen belanja tersebut adalah: manajemen dan koordinasi, peningkatan kurikulum dan pembelajaran, peningkatan peserta didik, Peningkatan Sarpras dan DAK Fisik, Pengembangan teknologi digital, pelatihan guru dan tendik, serta alokasi BOS untuk belanja di sekolah).
4. **Pertama**, kegiatan manajemen dan koordinasi yang kini masih relatif terstandar (*business as usual*) perlu dilakukan penajaman terhadap isi, bentuk dan sifat kegiatannya agar sesuai dengan kebijakan Pemerintah, kebijakan Pemprov dan tantangan pendidikan ke depan. Jenis kegiatan seperti rapat-rapat kerja pengelola makro pendidikan tidak secara tajam menysasar ke jantung manajemen sekolah dan pembelajaran. Kegiatan '**meta manajemen**' seperti ini perlu diarahkan kembali kepada penguatan manajemen sekolah, misalnya membangun jejaring sekolah dengan dan lembaga kemasyarakatan, industri, perusahaan atau lembaga sosial lain sebagai sumber belajar.
5. **Kedua**, pada tahun 2018, peningkatan kurikulum, merupakan kegiatan yang tidak terlalu signifikan dari belanja BOP Dikmen tahun 2018. Agar dapat memberikan bantuan bagi sekolah-sekolah berkaitan langsung dengan pembelajaran, peningkatan kurikulum dapat dipadukan dengan pembelajaran mana nomenklaturnya perlu diubah, misalnya "Pembinaan Kurikulum dan Pembelajaran, agar keberadaan kurikulum terkait langsung dengan proses pembelajaran yang nyata di sekolah. Dengan nomenklatur baru, pembinaan kurikulum perlu memasukan, misalnya: pengembangan program-program keahlian/ peminatan yang sesuai kebutuhan wilayah; penyusunan rencana pembelajaran teori dan praktek; koordinasi sekolah dengan industri yang relevan, pengembangan pembelajaran digital melalui praktek industri, pengembangan dan penerapan uji kompetensi siswa, pengembangan program dan pelaksanaan kerjasama sekolah-industri dalam pembelajaran praktek kejuruan dan sejenisnya.
6. **Ketiga**, mulai tahun 2020 belanja "Peningkatan Peserta Didik" perlu mulai mengenalkan program *blockgrant* untuk memfasilitasi siswa (individual, kelompok) dalam melakukan inovasi dalam belajar dan/atau menemukan suatu inovasi teknologi terapan tertentu yang berguna bagi dan diminati oleh masyarakat. Bagi siswa yang berhasil menemukan suatu model teknologi atau ilmu pengetahuan terapan tertentu, diberikan *reward* misalnya dalam bentuk nilai pretasi belajar, kelulusan kesempatan melanjutkan sekolah, serta paten dan kesempatan untuk koneksi dengan perusahaan tertentu untuk skala bisnis.
7. **Keempat**, ditengarai belanja DAK fisik untuk pemeliharaan dan perbaikan sarpras seolah terpisah dengan belanja peningkatan sarpras dari APBD. DAK-Fisik untuk pemeliharaan dan perbaikan sarpras perlu diintegrasikan dengan perencanaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dari APBD.



LAPORAN AKHIR:
Analisis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA /SMK Provinsi Banten
TAHUN 2019

Dengan kata lain, belanja peningkatan sarpras pendidikan (APBD) harus berjalan seiring dengan dan dilengkapi oleh DAK-Fisik, sehingga semakin besar belanja sarpras daerah, secara otomatis akan diikuti oleh kenaikan besaran DAK fisik untuk pemeliharaan dan pebaikannya.

8. **Kelima**, belanja pemanfaatan teknologi digital yang relatif kecil memerlukan perhatian serius; betapa pentingnya pemanfaatan teknologi pembelajaran yang berbasis digital. Dalam era ini, penggunaan TIK semakin diminati dan dikuasai oleh para siswa dalam proses pembelajaran secara mandiri sehingga peserta didik juga dapat semakin cepat dan kreatif dalam belajar untuk akselerasi peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Belanja “Peningkatan Peserta Didik” pada 2018 sebesar 17,8 milyar (1,99%) kurang memadai dan perlu ditingkatkan pada tahun 2020 dan seterusnya.
9. **Keenam**, menghadapi tantangan perubahan teknologi yang sangat cepat maka pelatihan guru, pengelola pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang kini seolah merupakan kegiatan yang terpisah-pisah, perlu dipadukan di dalam suatu jenis belanja yang lebih besar yaitu “Pengembangan SDM Pendidikan” menuju terbentuknya sistem pelatihan yang terinstitusikan. Jika lembaga atau pusat pelatihan sudah ada, maka integrasi ini perlu dilakukan untuk pengembangan program lembaga pelatihan tersebut; jika belum ada, maka setiap KCD dapat ditugaskan untuk mengembangkan institusi dan program pelatihan sendiri, sesuai program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan wilayah.
10. **Ketujuh**, struktur Belanja BOS di sekolah perlu diperbaiki dan diarahkan pada beberapa kegiatan yang peka dalam memacu siswa untuk belajar secara optimal, seperti: perbaikan dan pemeliharaan sarana & prasarana pendidikan, praktek kerja kerja, uji kompetensi (untuk SMK) dan belanja untuk pendayagunaan TIK untuk pembelajaran dan manajemen sekolah. Di SMK, belanja transportasi masih rendah, yang artinya proses pembelajaran lebih banyak dilakukan di sekolah ketimbang praktek lapangan atau paktek di industri.
11. **Akhirnya**, berdasarkan kajian ini diperlukan perbaikan juklak dan juknis untuk belanja BOP Pendidikan dan belanja BOSDA, sesuai dengan saran-saran yang dikemukakan di atas, agar benar-benar dapat menopang kebijakan Gubernur untuk mewujudkan pendidikan menengah gratis yang bermutu, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah provinsi Banten.



LAPORAN AKHIR:
Analisis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA /SMK Provinsi Banten
TAHUN 2019

Lampiran Policy Brief

**Tabel 1: Perkiraan Perhitungan *Unit Cost* BOP (BOS & Personil)
SMA dan SMK Provinsi Banten, 2019**

Unit Cost (UC) BOP	Kabupaten				Kota				Prov. Banten
	Pand	Lbk	Tgr	Srng	Tgr	Clg	Srng	Tngsl	
Perkiraan Rendah	4,83	4,57	5,24	4,90	5,15	5,05	5,00	5,14	4,92
Semua Sampel	4,84	4,88	5,55	5,18	5,59	5,37	5,37	5,55	5,33
Perkiraan Tinggi	5,68	5,74	5,78	5,63	6,05	6,01	5,26	5,73	5,71
Perkiraan Rendah	4,73	4,74	5,03	5,02	5,05	4,92	4,96	5,05	4,97
Semua Sampel	4,90	5,01	5,69	5,31	5,73	5,50	5,50	5,69	5,64
Perkiraan Tinggi	5,18	5,26	5,87	5,88	6,01	6,19	5,79	5,86	5,84
UC SMA+SMK	4,87	4,94	5,62	5,24	5,66	5,43	5,44	5,62	5,43

**Tabel 2: Jumlah dan Persentase Guru Honorer di SMA dan SMK,
Provinsi Banten, 2018**

Kabupaten/Kota	SMA				SMK				Grand Total
	PNS	GTY	GTT	Total	PNS	GTY	GTT	Total	
Kab. Pandeglang	423	162	244	829	253	649	494	1.396	2.225
Kab. Lebak	413	167	395	975	143	388	366	897	1.872
Kab. Tangerang	566	947	732	2.245	165	1.379	734	2.278	4.523
Kab. Serang	486	387	401	1.274	140	728	319	1.187	2.461
Kota Cilegon	268	173	80	521	186	264	138	588	1.109
Kota Tangerang	653	548	351	1.552	438	1.256	549	2.243	3.795
Kota Serang	310	133	184	627	292	398	332	1.022	1.649
Kota Tangsel	448	694	448	1.590	114	772	403	1.289	2.879
Prov. Banten	3.567	3.211	2.835	9.613	1.731	5.834	3.335	10.900	20.513
% GTT	0,37	0,33	0,29	1,00	0,16	0,54	0,31	1,00	
% Guru SMA/K				0,47				0,53	1,00

Sumber: Dapodik Provinsi Banten, 2018



LAPORAN AKHIR:
Analisis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA /SMK Provinsi Banten
TAHUN 2019

**Tabel 3: Realisasi Belanja dan *Unit Cost* BOP SMA dan SMK
di Provinsi Banten, 2018**

NO	URAIAN KEGIATAN	Realisasi BOP Dikmen 2018 (Juta Rp)		
		Realisasi	SMA	SMK
A	Belanja Tidak Langsung	867.170		
B	Biaya Langsung			
B1.	BOP NON-BOS			
	1. Manajemen & Koordinasi	48.801	27.083	21.718
	2. Peningkatan TU KCD	6.867	4.052	4.052
	3. Layan/Pemanf/Evaluasi TIK	6.867	2.816	4.052
	4. BOS (DAK) SMA	159.250	159.250	
	5. BOSDA SMA	164.062	164.062	
	6. Peningkatan sarpras SMA	101.659	13.287	
	7. Peningkatan kurikulum SMA	7.500	6.867	
	8. Pengembangan SDM SMA	23.735	19.743	
	9. BOS (DAK) SMK	100.534		100.534
	10. BOSDA SMK	146.395		129.281
	11. Peningkatan sarpras SMK	143.648		120.660
	12. Peningkatan kurikulum SMK	6.900		6.192
	13. Pengembangan SDM SMK	11.500		9.799
	Jumlah BL (BOP Dikmen)		397.159	396.287
	Jumlah Anggaran 2018	1.794.888		
	Jumlah Siswa	180.904	93.230	87.674
	Unit Cost	5,13	4,26	4,52



LAPORAN AKHIR:
Analisis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA /SMK Provinsi Banten
TAHUN 2019

**Tabel 4: Perkiraan Realisasi Belanja dan *Unit Cost* BOP SMA dan SMK
Provinsi Banten, 2019**

No	Uraian Kegiatan	Realisasi BOP Dikmen 2019 (Juta Rp)		
		Realisasi	SMA	SMK
A	Belanja tidak langsung	1.021.654,7		
B	Biaya Langsung			
B1	BOP NON-BOS			
	Manajemen & Koordinasi	48.800,6	27.082,8	21.717,8
	Peningkatan TU KCD	7.500,0	4.453,3	4.453,3
	Layan/Pemanf/Evaluasi TIK	7.500,0	3.046,7	4.453,3
	BOS (DAK) SMA	167.212,5	167.212,5	
	BOSDA SMA	213.231,5	172.329,9	
	Peningkatan sarpras SMA	111.824,8	111.824,8	
	Peningkatan kurikulum SMA	8.700,0	8.700,0	
	Pengembangan SDM SMA	27.532,8	27.532,8	
	BOS (DAK) SMK	115.614,1		115.614,1
	BOSDA SMK	247.707,4		200.449,0
	Peningkatan sarpras SMK	158.013,1		158.013,1
	Peningkatan kurikulum SMK	8.004,0		8.004,0
	Pengembangan SDM SMK	13.340,0		13.340,0
B2	Belanja Honorarium GTT		40.901,6	47.258,5
	Jumlah BOP Dikmen	1.134.980,8	563.084,3	573.303,1
	Jumlah Seluruh Belanja	2.156.652,7		
	Jumlah Siswa SM Negeri	207.293,8	105.64	101.649
	Unit Cost	5,48	5,33	5,64

*) Upah/Jasa Guru Honorer 2019 dan 2020, Pergub Banten No. 33/2019



LAPORAN AKHIR:
Analisis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA /SMK Provinsi Banten
TAHUN 2019

**Tabel 5: Simulasi Perkiraan Belanja BOP Pendidikan Menengah
Provinsi Banten, 2020**

NO	URAIAN KEGIATAN	Perkiraan BOP Dikmen 2020 (Juta Rp)				
		Belanja Riil 2019	UC Bosda	Simulasi	SMA	SMK
A	Belanja Tidak Langsung	1.087.145,65				
B	Biaya Langsung					
B1.	BOP NON-BOS					
1	Manajemen & Koord	48.800,5		48.800,6	27.082,8	21.717,8
2	Peningkatan TU KCD	6.000,0		6.000,0	3.000,0	3.000,0
3	Layan/Pemanf/Ev.TIK	8.250,0		8.250,0	4.125,0	4.125,0
4	BOS (DAK) SMA	173.901,0		173.901,0	173.901,0	
5	BOSDA SMA	268.671,7	1,00	105.644,3	105.644,3	
6	Peningk sarpras SMA	123.007,3	1,15	121.491,0	121.491,0	
7	Peningk kurikulum SMA	8.700,0	0,80	84.515,5	84.515,5	
8	Pengemb GTK SMA	27.532,8	1,10	116.208,8	116.208,7	
9	BOS (DAK) SMK	126.019,4		126.019,4		126.019,4
10	BOSDA SMK	287.340,6	1,00	101.649,5		101.649,5
11	Peningk sarpras SMK	166.632,0	1,40	141.902,7		141.902,7
12	Peningk kurikulum SMK	8.004,0	0,88	89.451,6		89.451,6
13	Pengemb GTK SMK	13.340,0	1,40	142.309,3		142.309,3
B2	Belanja Honor GTT	113.501,9		113.501,9	52.791,60	60.710,3
Jml Belanja (BOP Dikmen)		1.379.701,2		1.379.645,4	688.759,93	690.885,5
Jml Belanja Dikmen 2020		2.353.344,9				
Jumlah Siswa		387.693,0			127.548	121.208
Unit Cost		5,0			5,40	5,70

**Tabel 6: Restrukturisasi Belanja BOS di Tingkat Satuan Pendidikan
Hasil Survey Sekolah di Prov. Banten, 2019**

BELANJA BOS DIKMEN	Belanja BOS di Sekolah			
	SMA-2019	SMA-2020	SMK-2019	SMK-2020
TU dan ATK	14.279	11.756	17.686	12.740
Bahan Habis Pakai	43.368	35.705	44.953	32.381
Daya&Jasa	35.156	28.944	27.707	19.958
Pemeliharaan/Perbaikan	79.122	65.141	52.902	38.107
Konsumsi	19.712	16.229	28.970	27.103
Transportasi	46.525	38.304	37.626	20.868
Asuransi	2.596	2.137	1.672	1.204
Praktek Kerja/Ekskul	48.675	40.074	73.439	52.900
Pelaporan	2.200	1.811	1.495	1.077
Uji Komp	47.910	39.444	29.613	21.331
Jml Bel, BOS di Sekolah	339.542	279.545	316.063	227.669



LAPORAN AKHIR:
Analisis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA /SMK Provinsi Banten
TAHUN 2019